

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentuk-bentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak daripada kemampuan untuk melukiskannya. Iklim yang diciptakan oleh korupsi menguntungkan bagi tumbuh suburnya berbagai kejahatan.¹

Korupsi pun menjadi permasalahan yang sungguh serius dinegeri ini. Kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Berkembang dengan pesat, meluas dimana–mana, dan terjadi secara sistematis dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Kasus terjadinya korupsi dari hari kehari kian marak. Hampir setiap hari berita tentang korupsi menghiasi berbagai media. Bahkan Korupsi dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang sehingga masyarakat sulit membedakan nama perbuatan korup dan mana perbuatan yang tidak korup. Meskipun sudah ada komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan beberapa instansi antikorupsi lainnya, faktanya negeri ini menduduki rangking teratas sebagai negara terkorup di dunia.

Tindak korupsi di negeri ini bisa dikatakan mulai merajalela, bahkan menjadi kebiasaan, dan yang lebih memprihatinkan adalah korupsi dianggap biasa saja atau hal yang sepele. Berbagai upaya telah dilakukan oleh

¹ Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 96.

pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi, namun tetap saja korupsi menjadi hal yang sering terjadi.

Memerangi korupsi bukan cuma menangkap koruptor. Sejarah mencatat, dari sejumlah kejadian terdahulu, sudah banyak usaha menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara. Era orde baru, yang berlalu, kerap membentuk lembaga pemberangus korupsi. Mulai Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, Komisi Empat pada tahun 1970, Komisi Anti Korupsi pada 1970, Opstib di tahun 1977, hingga Tim Pemberantas Korupsi. Nyatanya, penangkapan para koruptor tidak membuat jera yang lain. Koruptor junior terus bermunculan.²

Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya lewat penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini adalah kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi.³ Bangsa Indonesia sekarang butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Kesadaran tersebut membuat pemerintah memutar otak untuk bagaimana menciptakan hal tersebut. Lebih khusus kepada penanaman nilai antikorupsi pada setiap individu putra bangsa. Namun masalahnya adalah Membentuk hal tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Generasi sekarang memang masih mengalaminya (korupsi), tetapi generasi yang akan datang, semoga dikabulkan Tuhan dengan kerja keras semuanya, hanya akan melihat kejahatan korupsi, kemiskinan dan

²Faisal Djabbar (Fungsional Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam <http://www.unindra.ac.id>, akses 18 November 2014.

³La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia* (Jurnal Hukum Pro Justitia, 2008), Vol.26. No.1.

ketimpangan sosial pada deretan diorama di Museum Nasional.⁴ Harapan segenap bangsa ini adalah dimana korupsi tidak akan terjadi lagi digenerasi berikutnya. Lain sisi, penindakan korupsi sekarang ini belum cukup dan belum mencapai sasaran, hingga pemberantasan korupsi perlu ditambah dengan berbagai upaya di bidang pencegahan dan pendidikan.

Menanggapi masalah tersebut beberapa kalangan elemen masyarakat mengungkapkan bahwa ada kekeliruan dalam upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah, karena fokusnya hanya kepada menindak para koruptor. Seperti apa yang dikatakan oleh M. Zaki:

“di Indonesia, Pedagogi harapan tersebut, belum sepenuhnya masuk ke dalam lini pendidikan. Negara justru mensibukkan dirinya dengan mengotak-atik mahzab pidana mati dan perampasan aset diruang parlemen. Padahal esensi dari aktivitas pemberantasan korupsi adalah melakukan pencegahan agar tidak menimbulkan tindak pidana tersebut.⁵

Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.⁶ Sedikit sekali upaya untuk pencegahan korupsi, salah satunya yaitu lewat pendidikan antikorupsi.

⁴M. Fajroel Rahman, “Indonesia: Korupsi harus masuk ke Meseum”, dalam M. Reza S. Zaki. dkk, *Negeri Melawan Korupsi* (Yogyakarta: Bulaksumur Visual, 2012), hlm. 106.

⁵M. Reza S. Zaki, dalam *Negeri Melawan Korupsi* (Yogyakarta: Bulaksumur Visual, 2012). hlm. 20.

⁶Lukman Hakim, dalam *Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jurnal Pendidikan Agama islam- Ta’lim, 2012), Vol.10. No.2.

Menyadari hal tersebut muncul gagasan untuk memasukkan materi antikorupsi kedalam kurikulum pendidikan SD-SMU di Indonesia.

Proses pendidikan mestinya bersifat sistematis dan massif. Cara sistematis yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan antikorupsi secara intensif. Pendidikan antikorupsi menjadi sarana sadar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.⁷

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina

⁷Sumiarti, *Pendidikan Antikorupsi* (Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan P3M STAIN Purwokerto INSANIA, 2007), Vol.12. No.2.

kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa.⁸ Pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang antikorupsi.

Kekhasan pendidikan antikorupsi ialah dapat menghasilkan anak bangsa yang jujur boleh jadi Indonesia akan menjadi bangsa yang teregister sebagai Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik bangsa paling “bersih”. Diharapkan pemerintah dapat membangun kerja sama dengan berbagai pilar utama pendidikan yaitu: sekolah, orang tua, dan masyarakat serta pihak swasta dalam membangun karakter jujur dan membuat bangsa ini sehat secara mental dan moral.⁹ Inti dari materi pendidikan antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari sembilan nilai yang disebut dengan sembilan nilai antikorupsi. Sembilan nilai tersebut adalah: tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli.

⁸Oktavia Adhi Suciptionsih, *Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Gunung Pati* (Jurnal Universitas PGRI Semarang, 2014), Vol.4. No.2.

⁹ Rosida Tiurma Manurung, *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik* (Jurnal Sisioteknologi, 2012), Edisi. 27.

Wacana inilah yang disikapi secara cerdas oleh SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, dengan mulai melaksanakan pendidikan antikorupsi. Beberapa sekolah di Indonesia sebenarnya telah melaksanakan pendidikan antikorupsi dengan cara mengintegrasikannya melalui beberapa mata pelajaran. Namun berbeda dengan sekolah lain SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali melaksanakan pendidikan antikorupsi dengan Pendidikan antikorupsi yang diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri. Sehingga inilah yang menjadi motivasi untuk meneliti fenomena tersebut, dengan mengambil judul *“Implementasi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015”*.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah ini, dimaksudkan agar penelitian tidak melebar permasalahannya. sehingga mudah untuk memahami hasilnya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali tahun pelajaran 2014/2015?
2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali tahun pelajaran 2014/2015?
3. Bagaimana Evaluasi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali tahun pelajaran 2014/2015?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam tesis ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan perencanaan kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali.
- b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali.
- c. Untuk mendeskripsikan evaluasi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademik

- 1) Penelitian ini diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah metode yang tepat dalam mengimplementasi dan menjamin mutu kurikulum pendidikan anti korupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam dunia pendidikan secara umum dan secara khusus mengenai pelaksanaan pembelajaran di tingkat SMA.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi, pembenahan dan perbaikan dalam sistem pendidikan yang sedang berkembang akhir-akhir ini.

b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi sekolah terkait baik dari pihak SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali ataupun pihak lain yang ingin lebih mengembangkan atau melaksanakan kurikulum pendidikan antikorupsi.
- 2) Untuk pihak SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, semoga penelitian ini dapat menjadikan acuan bagi perkembangan yang lebih lanjut.

D. TELAAH PUSTAKA

Ada beberapa penelitian yang sejenis, yang mengangkat tentang pendidikan antikorupsi diantaranya adalah:

Muhlis Kurnianto¹⁰, dalam skripsinya yang berjudul "*Muatan Materi Pendidikan Antikorupsi (Analisis Isi pada Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII karangan Dwiyono dkk serta Pelaksanaannya di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Muatan materi pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam buku PKn kelas VIII karangan Dwiyono dkk yang digunakan sudah sesuai dengan kurikulum dan SKKD PKn, nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang termuat dalam buku PKn kelas VIII karangan Dwiyono dkk meliputi jujur, bertanggung jawab, berani, gigih dan ulet, kreatif, peduli, disiplin, kebersamaan, dan kesederhanaan. 2)

¹⁰ Muhlis Kurnianto. "*Muatan Materi Pendidikan Antikorupsi (Analisis Isi Pada Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII Karangan Dwiyono Dkk Serta Pelaksanaannya Di Smp Muhammadiyah 7 Sumberlawang Kabupaten Sukoharjo Taun Peljaran 2012/2013.)*" (Surakarta: UMS, 2013).

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang, kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dilakukan bersamaan dalam proses pembelajaran PKn, selain itu pelaksanaan pendidikan anti korupsi juga dilakukan di luar kelas di dalam lingkungan sekolah. Skripsi Muhlis Kurnianto ini berbeda dengan penelitian ini karna skripsi tersebut menganalisis muatan pendidikan antikorupsi yang terdapat dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII (SMP), sedangkan tesis ini meneliti implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA.

Rohmad¹¹, dalam Tesisnya yang berjudul "*Pengelolaan Karakter Antikorupsi Kerja Keras dan Tanggung Jawab dalam Kelas Entrepreneurship Di SMK Negeri 4 Surakarta*". Hasil penelitian ini adalah 1) Pengelolaan karakter antikorupsi kerja keras dalam kelas *entrepreneurship* dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yaitu diawali pembuatan perencanaan bisnis (*business plan*) yang memuat halaman pendahuluan, ringkasan eksekutif, ide usaha dan pasar, rencana pemasaran produk, pemasok, rencana keuangan, analisa resiko, komitmen kerja dan kerangka peraturan kerja, kemudian dilanjutkan proses produksi, promosi, penjualan produk dan diakhiri dengan membuat laporan dan supervisi. Kegiatan itu dilakukan berulang terus setiap minggu sehingga menumbuhkan dan membentuk pribadi yang kuat, gigih, usaha, obsesi, tabah, mempunyai impian, keras pendirian, pantang menyerah dan sungguh-sungguh. 2) pengelolaan karakter antikorupsi tanggung jawab dalam kelas *entrepreneurship*, bahwa

¹¹ Rohmad. "*Pengelolaan Karakter Antikorupsi Kerja Keras Dan Tanggung Jawab Dalam Kelas Entrepreneurship Di SMK Negeri 4 Surakarta*". (Surakarta: UMS, 2013.)

pelaksanaan kegiatan usaha secara kelompok dengan tugas masing-masing yaitu sebagai *leadergroup*, *finance manager*, *production manager*, *logistic manager*, *selling manager*, dan *quality control*. Tesis Rohmad meneliti pengelolaan karakter antikorupsi yaitu kerja keras dan tanggung jawab (hanya 2 nilai saja) dalam kelas *entrepreneurship di SMK*, sedangkan tesis ini meneliti tentang implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi (mencakup semua nilai antikorupsi) di SMA.

Kharisma Ardhy Wijayanto¹², dalam skripsinya yang berjudul “*Nilai Inti Karakter Antikorupsi dalam Pembelajaran Matematika Kelas Cerdas Istimewa*”. Hasil penelitiannya 1) Karakteristik karakter tanggung jawab siswa kelas cerdas istimewa dalam pembelajaran matematika dicerminkan dari pelaksanaan dan penyelesaian tugas dengan sungguh-sungguh, penepatan janji yang telah dibuat dalam pembelajaran matematika dan kesediaan siswa kelas cerdas istimewa dalam menerima akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, termasuk perbuatan baik maupun buruk saat pembelajaran matematika berlangsung. Karakter tanggung jawab memainkan peranan penting terhadap pencapaian matematika. 2) Karakteristik karakter disiplin siswa kelas cerdas istimewa dalam pembelajaran matematika dicerminkan dari ketaatan siswa terhadap peraturan yang berlaku dan ketepatan waktu siswa, baik ketepatan masuk sekolah maupun pengumpulan ulangan dan tugas. Karakter disiplin memainkan peranan penting terhadap pencapaian matematika. 3) karakteristik

¹²Kharisma Ardhy Wijayanto, *Nilai Inti Karakter Antikorupsi Dalam Pembelajaran Matematika Kelas Cerdas Istimewa*.(Surakarta:UMS, 2012)

karakter jujur siswa kelas cerdas istimewa dalam pembelajaran matematika dicerminkan dari melekatnya sifat dapat dipercaya pada diri siswa dan perkataan, perbuatan yang benar siswa saat pembelajaran matematika berlangsung. Karakter jujur memainkan peranan penting terhadap pencapaian matematika. Berbeda dengan skripsi Kharisma Ardhy Wijayanto yang meneliti tentang nilai karakter antikorupsi dalam pembelajaran Matematika kelas cerdas istimewa, tesis ini meneliti tentang implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi (khusus pada mata pelajaran pendidikan antikorupsi).

Sahid¹³, dalam skripsinya yang berjudul *Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Akhlak Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pendidikan antikorupsi berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 4 Andong Kabupaten Boyolali. Walaupun belum nampak secara menyeluruh, namun setidaknya sudah ada perubahan dengan apa yang dirasakan oleh pihak sekolah SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali. 2) Dengan menanamkan pendidikan antikorupsi akan mendorong siswa memiliki kepribadian yang mencerminkan perilaku antikorupsi. Kemudian, perilaku antikorupsi yang dimiliki siswa akan berdampak pada akhlak siswa, sehingga akan tercermin pada kehidupan sehari-hari. 3) Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang diajarkan khususnya pada kelas XI SMA adalah jujur, tanggung jawab dan disiplin. Namun nilai-nilai pendidikan

¹³ Sahid. 2015. *Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Akhlak Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015*.

antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong antara lain: sederhana, bekerja keras, mandiri, bertanggung jawab, disiplin, jujur, adil berani, peduli. 4) Secara keseluruhan akhlak siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali baik. Skripsi Sahid berbeda dengan tesis ini walaupun tempat penelitiannya sama, yang membedakan adalah skripsi Sahid meneliti pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap akhlak siswa kelas XI. Dan tesis ini lebih kepada implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA (tidak hanya kelas XI, tapi juga mulai dari kelas X, XI, dan XII).

E. KERANGKA TEORITIK

Penelitian tesis ini berjudul “Implementasi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015”. Judul tersebut dapat diungkapkan kerangka teoritik dari makna dan kandungannya sebagai berikut:

1. Kurikulum

a. Pengertian Implementasi Kurikulum

Kata implementasi memiliki makna pelaksanaan, penerapan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something*

into effect” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).¹⁴

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁵

Kurikulum, sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan.¹⁶ Begitu pentingnya kurikulum, maka dalam penyusunannya tidaklah diperbolehkan dikerjakan dengan sembarangan.

b. Landasan Kurikulum

Ada beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum yaitu landasan filosofis, landasan psikologi, landasan sosial budaya, serta perkembangan ilmu dan teknologi.¹⁷ Namun bisa diringkas setidaknya menjadi tiga dasar utama, yaitu dasar filosofis, sosiologis, dan psikologis.

Namun pendapat lain mengatakan, salah satu pegangan dalam pengembangan kurikulum ialah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh *Ralp Tyler* (1949), kurikulum ditentukan oleh

¹⁴Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 178.

¹⁵Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

¹⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* (Bandung: Rosda Karya, 2001), hlm. 38.

¹⁷*Ibid.* hlm. 38

empat faktor atau asas utama, yaitu¹⁸: Falsafah bangsa, masyarakat, sekolah dan guru-guru (aspek filosofis), harapan dan kebutuhan masyarakat (orang tua, kebudayaan, masyarakat, pemerintah, agama, ekonomi, dan sebagainya) (aspek sosiologis), hakikat anak antara lain taraf perkembangan fisik, mental, psikologis, emosional, sosial, serta cara anak belajar (aspek psikologis), dan hakikat pengetahuan atau disiplin ilmu (bahan pelajaran).

Adapun dalam tesis ini maka yang akan dipakai adalah 3 landasan menurut Nana Syaodih, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis, karena ini dirasa lebih cocok dan relevan dengan penelitian ini. Bagian selanjutnya adalah pada tahap perencanaan kurikulum, dan ketiga landasan tersebutlah yang nantinya akan mewarnai tahap perencanaan.

c. Implementasi Kurikulum

1) Perencanaan kurikulum

Perencanaan kurikulum meliputi tiga kegiatan, yaitu: 1) Perencanaan strategis (*strategic planning*), 2) Perencanaan program (*program planning*), 3) Perencanaan kegiatan pembelajaran (*program delivery plans*).¹⁹

¹⁸S. Nasution., *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara,1999), hlm.6.

¹⁹Curtis R. Finch & John R. Cruncilton, *Curriculum Development in Vocational and Technical Education*, (Boston and London: Allyn and Bacon, 1993), hlm. 46-48. Dalam disertasi Dr. Abdullah, M.Ag (*Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta Tahun 2006-2007*), hlm. 56-57.

Teori perencanaan kurikulum ini digunakan dalam penelitian karena lebih cocok dan relevan dengan penelitian ini.

2) Pelaksanaan kurikulum

Tahap selanjutnya setelah perencanaan adalah tahap implementasi. Implementasi kurikulum adalah kegiatan menerapkan semua rancangan yang tercantum dalam kurikulum tertulis. Pada tahap ini, tujuan, program pendidikan, dan program pembelajaran yang telah direncanakan dilaksanakan dalam situasi pembelajaran.

Menurut Curtis R. Finch & Jhon R. Cruncilton, ada empat model implementasi kurikulum yang dapat dipilih, yaitu: (1) Program pendidikan berbasis individu (*Individual educational program*), (2) Pembelajaran berbasis modul (*modularized instruction*), (3) Pembelajaran berbasis kompetensi (*competency-based education*), dan (4) Kewirausahaan berbasis sekolah (*school-based enterprise*).²⁰

Teori pelaksanaan kurikulum ini digunakan dalam penelitian karena lebih cocok dan relevan dengan penelitian ini.

3) Evaluasi kurikulum

Tahap setelah pelaksanaan adalah evaluasi kurikulum, evaluasi kurikulum adalah tahap terakhir. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan menilai perencanaan, pelaksanaan dan hasil-

²⁰ *Ibid.* hlm.66-67.

hasil penggunaan suatu kurikulum. Berkaitan dengan ini ada dua macam model evaluasi seperti yang diungkapkan oleh Peter F. Oliva. Yaitu: 1) Model Saylor, Alexander, dan Lewis, serta 2) model CIPP (*context, input, process, dan product*) dari Stufflebeam.²¹

Teori evaluasi kurikulum ini digunakan dalam penelitian karena lebih cocok dan relevan dengan penelitian ini.

2. Pendidikan Antikorupsi

a. Pengertian Korupsi

Termaktub dalam Ensiklopedia Indonesia “korupsi” (dari bahasa latin *corruption*= penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- 2) Perbuatan yang buruk seperti menggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- 3) Korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya),

²¹ *Ibid.* hlm. 74.

- 4) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya), Koruptor (orang yang korupsi).²²

b. Bentuk-bentuk Korupsi

Bentuk korupsi sangatlah beragam. Menurut Hussein al-Attas, modus operandi bentuk-bentuk korupsi mencakup penyuaipan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan Nepotisme. (Al-attas, 1982: 13-14).²³

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu²⁴: Korupsi ekstortif, korupsi manipulatif, korupsi nepotistik, dan korupsi subversif.

Secara lengkap dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) Merumuskan 30 bentuk / Jenis tindak pidana korupsi, yang dikelompokan yaitu sebagai berikut²⁵: Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, curang, kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (pemberian hadiah).

²² Evi, Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8

²³ Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi (Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi Di Sekolah)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 68.

²⁴ Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), hlm. 18

²⁵ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 28-30.

c. Penyebab Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi, diantaranya adalah²⁶: penyalahgunaan wewenang dan jabatan/kekuasaan yang dimiliki demi kepentingan dan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman, buruknya hukum, tetapi juga buruknya manusia, warisan, kemiskinan, ketidaksamaan, ketidakmerataan, gaji yang rendah, salah persepsi, pengaturan/hukum yang bertele-tele, dan pengetahuan yang tidak cukup dibidangnya, perumusan undang-undang yang kurang sempurna, administrasi yang lamban, mahal dan tidak luwes. Tradisi menambah penghasilan, Persepsi bahwa korupsi hal yang biasa dan kalau terdesak maka tidak apa-apa, dan selama tidak berlebihan itu sah-sah saja, serta tidak ada penghargaan atas aturan-aturan resmi dari negara, dan budaya dimana korupsi tak menjadi soal.

d. Pendidikan Antikorupsi

1) Pengertian

Antikorupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Antikorupsi merupakan sikap yang dapat mencegah (upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi) dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.

²⁶ *Ibid.* hlm. 31-34.

Pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah atau madrasah, pendidikan informal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengalaman nilai antikorupsi menjadi kebiasaan sehari-hari.²⁷

2) Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan antikorupsi adalah sebagai berikut:²⁸

Pertama, untuk menanamkan semangat antikorupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat antikorupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi dimasa depan tidak akan terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisasi, setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal.

Kedua, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan agung, melainkan tanggung jawab lembaga pendidikan dan semua komponen anak bangsa. (Berydevanda, 2011: 33).

3) Model Pendekatan Pendidikan Antikorupsi

Kurikulum pendidikan antikorupsi secara konseptual dapat diorganisasikan melalui tiga pendekatan. Pertama, dilaksanakan

²⁷ Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi (Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi Di Sekolah)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm:178-179.

²⁸ *Ibid.* hlm. 99-100.

secara terpisah (*separated*). Kedua, dilaksanakan pada mata pelajaran yang berhubungan (*correlated*). Dan ketiga dilaksanakan secara terintegrasi (*integrated*).²⁹

Tiga pendekatan ini dicantumkan dalam kerangka teori tesis ini karena dalam pendidikan antikorupsi memang hanya melalui tiga pendekatan atau model ini.

4) Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi

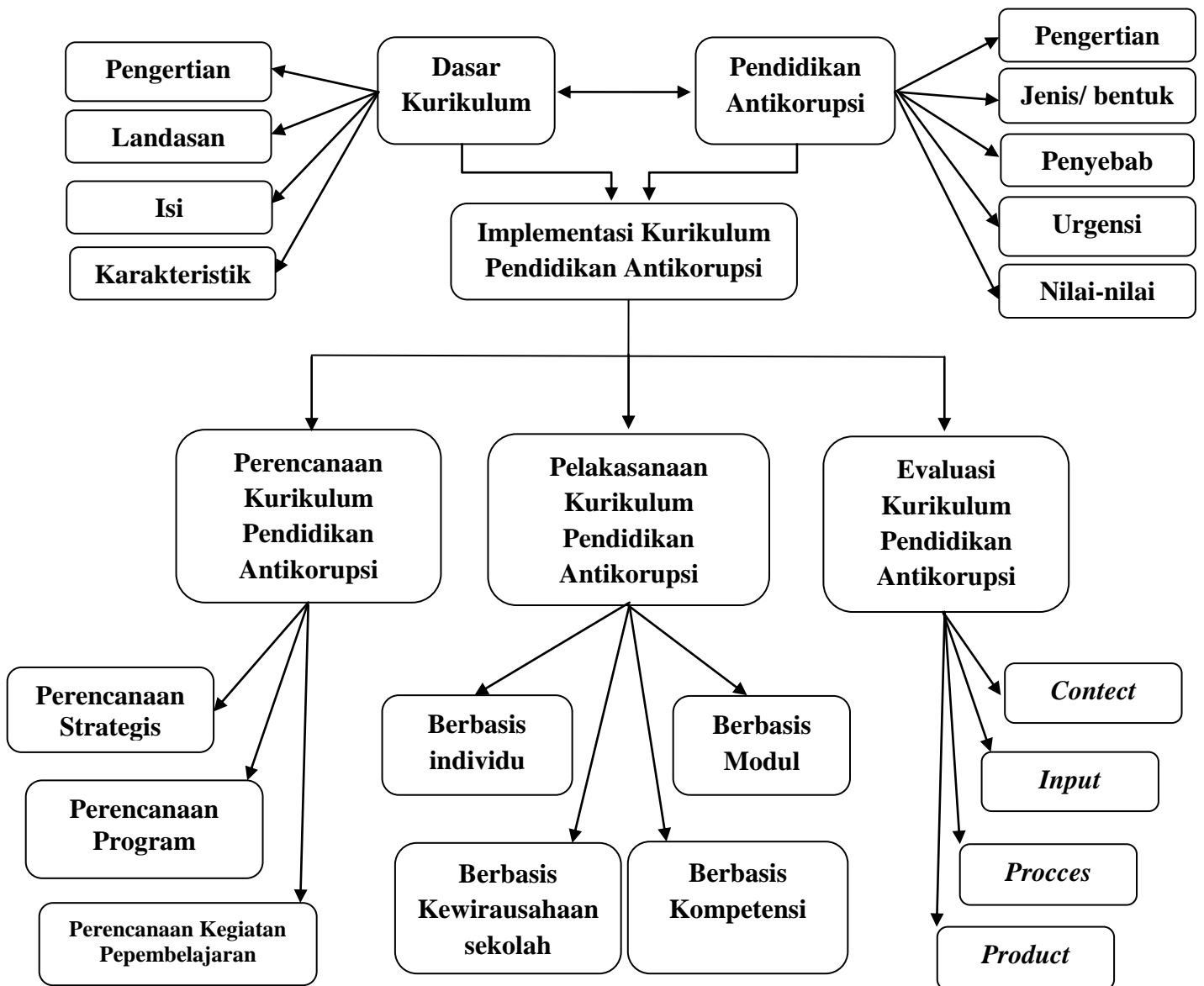
Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2012), terdapat nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam pendidikan antikorupsi yaitu:³⁰ Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada kerangka teori ini akan digunakan karena, nilai-nilai inilah yang ada pada pendidikan antikorupsi. Dan nilai-nilai ini pula lah yang diajarkan pada mata pelajaran pendidikan antikorupdi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali.

²⁹ *Ibid.* hlm. 101.

³⁰ Agus Wibowo, hlm. 45-46.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status sebuah fenomena. Bersifat deskriptif kualitatif, dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang diperlukan dan dapat diamati.³¹

Penelitian ini akan digunakan untuk meneliti tentang implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah pendekatan Phenomenologis. Pendekatan Phenomenologis yakni mendekati secara mendalam suatu fenomena (peristiwa-kejadian, dan atau fakta) yang menyita perhatian masyarakat luas karena keunikan atau kedahsyatan fakta tersebut mempengaruhi masyarakat.

Pendekatan ini dipakai karena dalam penelitian ini ingin meneliti sesuatu keunikan atau hal yang jarang dijumpai pada sekolah-sekolah lain, yang mana sekolah lain belum menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi seperti yang dilaksanakan oleh SMA 4 Muhammadiyah Andong Boyolali.

³¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2005), hlm. 4.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber dari mana data itu diperoleh. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan ini data yang diambil meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, dan guru-guru SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, atau elemen-elemen yang ada di sekolah.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-data tertulis seperti data sekolah, guru, karyawan dan siswa, struktur organisasi, daftar inventaris serta buku-buku penunjang, dan lain sebagainya.

4. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian adalah tempat dilakukan penelitian, misalnya sekolah, masyarakat, dan lembaga yang diteliti.³² Adapun Objek penelitian pada penelitian ini adalah sekolah, yaitu SMA Muhammadiyah 4 Andong kabupaten Boyolali Jawa Tengah.

³² Sudarno Sobron, dkk. *Pedoman Penulisan Tesis*, (Surakarta: M.Pd.I, M.PI, M.HI Sekolah Pascasarjana UMS, 2014), hlm.18.

Subyek penelitian adalah orang atau masyarakat yang akan digali informasinya untuk data penelitian.³³ Subyek penelitiannya adalah masyarakat sekolah SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, (kepala sekoah, guru, peserta didik, serta orang yang bisa memberi pengayaan data pada penelitian ini).

5. Pengumpulan Data

Ada dua data yang diharapkan dapat dikumpulkan dalam penelitian ini, *pertama*: data yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali. *Kedua*: data yang berkaitan dengan implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali.

Data yang diambil tidak terlepas dari metode pengumpulan data, dan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian.

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁴

³³*Ibid.* hlm. 18.

³⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2005), hlm.

Tujuan dari *instrument interview* ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali.

Wawancara dalam penelitian ini akan ditujukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah (bagian al-Islam dan Kemuhammadiyah), guru yang mengajarkan pelajaran antikorupsi, dan siswa.

b) Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau fenomena baik berupa manusia, benda mati, kegiatan, dan alam³⁵. Metode observasi yang peneliti gunakan adalah metode observasi partisipan yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dengan terlibat langsung terhadap objek yang diteliti dan mencatat secara langsung aktivitas belajar mengajar Pendidikan Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, serta mengamati secara langsung kondisi lokasi observasi.

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memberi data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar dan majalah, notulen, dan sebagainya.³⁶

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan kondisi sekolah SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali. Kemudian, data kurikulum pendidikan antikorupsi yang mana data tersebut bisa diperoleh dari: buku, modul guru, RPP, atau catatan-catatan lain yang tersedia.

6. Validitas Data

Sebuah penelitian kualitatif memiliki standar validitas data (keabsahan data). Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.³⁷

Uji validitas data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *credibility*. *Credibility* adalah dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.³⁸

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

³⁷ *Pedoman Penulisan Tesis*, (Surakarta: M.Pd.I, M.PI, M.HI Sekolah Pascasarjana UMS, 2014), hlm.19.

³⁸ *Ibid.* hlm. 20.

Perpanjangan pengamatan pada penelitian ini peneliti lakukan guna memastikan data yang sudah didapat, apakah sudah valid dan betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yaitu SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, apakah masih ada yang keliru dan perlu dibenarkan atau bahkan ditambahkan.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Sedang, analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen seperti, dikutip oleh Lexy J. Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data-data yang sudah didapat dari lapangan. Selanjutnya memilah-milah dan mengelola data yang ada, kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu data tersebut termasuk kepada data perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali tahun pelajaran 2014/2015.

³⁹ Moleong, hlm. 248.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I (satu) berisikan pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang penelitian ini dilaksanakan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai bahan pertimbangan dari pemilihan judul penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka dan kerangka teori. Sedangkan dalam metode penelitian yang membuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II (dua) berisikan kajian teori tentang konsep dasar dan landasan kurikulum pendidikan antikorupsi yang memuat (A) Pendidikan antikorupsi, yang membahas tentang: 1) pengertian korupsi, 2) Bentuk-bentuk korupsi, 3) Penyebab korupsi, 4) Prinsip-prinsip antikorupsi, 5) Pengertian Pendidikan antikorupsi, 6) Urgensi pendidikan antikorupsi. (B) Kurikulum pendidikan antiorupsi, akan membahas tentang: 1) pengertian kurikulum pendidikan antikorupsi, 2) Azas kurikulum pendidikan antikorupsi, 3) Tujuan kurikulum pendidikan antikorupsi, 4) Isi/materi pendidikan antikorupsi, dan 5) Fungsi kurikulum pendidikan antikorupsi. (C) Implementasi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi, meliputi: 1) Perencanaan kurikulum pendidikan antikorupsi, 2) Pelaksanaan kurikulum pendidikan antikorupsi, 3) Evaluasi kurikulum pendidikan antikorupsi, dan 4) Model implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi.

Bab III (tiga) berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang akan dibahas tentang (A) Profil SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali,

yang meliputi: 1) Sejarah singkat SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, 2) Letak geografis SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, 3) Visi-misi dan tujuan, 4) Jumlah siswa, 5) Jumlah guru dan tenaga pendukung, 6) Jumlah ketersediaan buku dan sarana prasarana, dan 7) Jumlah ketersediaan ruangan.

(B) Kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, yang meliputi: (1) Azas, tujuan, isi/materi, dan model implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi (2) Implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, meliputi (a) Perencanaan kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, (b) Pelaksanaan kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, (c) Evaluasi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali.

Bab VI (empat) akan membahas tentang analisis data, pada bab ini akan membahas tentang implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali tahun pelajaran 2014/2015.

Bab V (lima) adalah bab penutup, yang akan membahas tentang a) kesimpulan dari hasil penelitian yang di lakukan di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali. b) saran-saran dan, c) rekomendasi. Kemudian pada akhir dari penyusunan tesis ini akan disampaikan daftar pustaka serta lampiran-lampiran sebagai penunjang dan acuan dalam menganalisa penulisan tesis ini.